

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB PEMENUHAN SERTIFIKAT BEBAS PENCEMARAN DARI KAPAL SEBAGAI SYARAT LAIK LAUT

Oleh : Rahmat Setiawan

Dosen Pembimbing Utama : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Kelaiklautan adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, dan status hukum kapal.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhan sertifikat bebas serta bagaimana pemerintah menindaklanjuti pencemaran lingkungan yang berasal dari kapal serta apa saja syarat untuk memenuhi kelaiklautan nahkoda dalam menjalankan sebuah kapal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normative dimana menggunakan dasar analisis penelitian terhadap Undang-Undang atau beberapa studi kepustakaan seperti literatur buku, dokumen yang masih berlaku dengan tujuan agar tercapainya penelitian skripsi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian skripsi ini yaitu setiap kapal diwajibkan memiliki Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar dalam Rangka Pemenuhan Kelaiklautan Kapal untuk menghindari kecelakaan di laut serta kelestarian lingkungan laut agar tidak tercemar.

Kesimpulannya adalah Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Saran yang bisa diperhatikan dalam penelitian ini adalah sebagai negara hukum untuk sesegera mungkin mengakomodir dan mengintegrasikan unsur *Soft Law* dan *Hard Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Sertifikat Bebas Pencemaran, Laik Laut

ABSTRACT

RESPONSIBILITY OF FULFILLMENT OF CERTIFICATE OF FREE OF POLLUTION FROM SHIP AS A CONDITION OF SEAWORTHINESS

By : Rahmat Setiawan

Main Advisor : Yayuk Sugiarti, S.H., M.H.

Advisory Lecturer : Imam Rofiqi, S.H., M.Kn.

Seaworthiness is the condition of the ship that meets the requirements for ship safety, prevention of water pollution from ships, manning, loading lines, loading, welfare of the crew and the health of passengers, and the legal status of the ship.

The purpose of this study is to find out the government's responsibility in fulfilling the free certificate and how the government follows up on environmental pollution originating from ships and what are the requirements for fulfilling seaworthiness of the captain in operating a ship.

The method used in this study is by using normative juridical methods which use the basis of research analysis of laws or some literature studies such as literature, books, documents that are still valid with the aim of achieving thesis research.

The results obtained from this thesis research are that every ship is required to have a Certificate of Compensation Guarantee Fund for Fuel Oil Pollution in the Context of Fulfilling Ship Seaworthiness to avoid accidents at sea and preserve the marine environment so that it is not polluted.

The conclusion is that sustainable development is a development strategy effort to ensure the integrity of the environment as well as the safety, capability, welfare and quality of life of present and future generations. Suggestions that can be considered in this research are as a rule of law to as soon as possible accommodate and integrate elements of Soft Law and Hard Law in the formation of statutory regulations.

Keywords : Responsibility, Pollution Free Certificate, Seaworthy